

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengembangan wilayah merupakan upaya mengawinkan secara harmonis sumberdaya alam, manusia dan teknologi dengan memperhitungkan daya tampung dan lingkungan itu sendiri (Matondang, 2018:1). Konsep pengembangan wilayah dimaksud untuk memperkecil kesenjangan dan ketimpangan kesejahteraan anatar wilayah. Peran kebijakan pengembangan wilayah adalah untuk menghubungkan kegiatan yang terpisah-pisah sehingga diharapkan akan tercapai tujuan pembangunan nasional secara keseluruhan (Fridmann dalam Muta'ali, 2011:1). Pembangunan wilayah sangat diperlukan untuk kelanjutan hidup manusia (Sitorus, Leonataris & Panuju 2012:1). Pembangunan mengandung nilai-nilai hakiki yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendasar, terdapat hampir semua masyarakat di segala zaman. Nilai tersebut adalah kebutuhan hidup, harga diri dan kebebasan, oleh karena itu sasaran adanya pembangunan mencakup pada tiga hal, yaitu: (1) meningkatkan persediaan dan perluasan distribusi bahan pokok seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan dan perlindungan (2) meningkatkan taraf hidup yang meliputi menyediakan lapangan pekerjaan, pendidikan yang lebih baik, memperhatikan kebutuhan manusiawi serta meningkatkan kesadaran dan harga diri (3) memperluas jangkauan pilihan ekonomi sosial bagi setiap individu dengan membebaskan masyarakat dari dikap perbudakan dan ketergantungan(Mahi, 2016: 65)

Salah satu fenomena yang terjadi sebagai ciri perkembangan wilayah yang terjadi pada negara maju dan berkembang adalah ketidak merataan distribusi spasial (Lipshitz, 1993: 1). Konsep geografi sebagai ilmu terus berkembang dan mengalami ekspansi paradigmatik ke arah yang lebih rinci dan praktis (Mukminan, 2018:1). Perkembangan wilayah secara geografis memang tidak akan merata, tergantung dengan karakteristik daerah dan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada pada daerah tersebut. Meningkatnya pertumbuhan jumlah dan kebutuhan penduduk maka meningkat pula kebutuhan tempat atau lahan untuk tempat tinggal serta tempat kegiatan kehidupan sosial ekonomi dan budaya (Febriani, 2018:18). Kondisi ketimpangan pembangunan antar wilayah disebabkan oleh adanya perbedaan kondisi geografis dan potensi yang terdapat pada tiap wilayah, potensi tersebut meliputi sumberdaya alam, sumberdaya manusia bahkan kebijakan pemerintah pun ikut andil di dalamnya (Matondang, 2018: 17). Perbedaan potensi akan mendorong proses pembangunan menjadi tidak seragam sehingga akan terjadi kesenjangan antar wilayah. Kesenjangan (ketimpangan) merupakan hal wajar terjadi pada wilayah yang sedang berkembang, namun kesenjangan akan menciptakan adanya wilayah maju (*Developed Region*) dan wilayah tertinggal (*Undeveloped Region*) (Sjafrizal, 2012: 32). Wilayah tertinggal dapat diartikan sebagai wilayah yang memiliki kondisi relatif kurang berkembang dibanding dengan wilayah lain, pada umumnya wilayah tertinggal dicirikan dengan letak geografis yang terpencil, miskin sumberdaya alam dan potensi bencana yang tinggi.

Perkembangan wilayah dapat dilakukan dengan mengelompokkan wilayah dengan menggunakan keunggulan sektor di wilayah tersebut, menurutnya pengelompokan dapat digunakan menggunakan kelengkapan infrastruktur (Ekasafitri, Rustiadi & Yulianda, 2017: 2). Ketersediaan sarana pemenuhan bagi masyarakat merupakan salah satu sektor vital dalam memacu pertumbuhan suatu wilayah (Boschma, 2000: 01). Pernyataan tersebut juga dipertegas dalam gagasan penelitian (Diamond & Spence, 1979: 03) pemenuhan sarana infrastruktur adalah modal utama percepatan perkembangan suatu wilayah. (Muta'ali, 2015:263) penentuan indikator perkembangan wilayah pada prinsipnya berorientasi pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di wilayah tersebut, menurutnya indikator perkembangan wilayah dapat berupa indikator tunggal (*single indicator*) dan indikator jamak (*multicriteria indicator*). Indikator tunggal umumnya merupakan indikator *input* yang meliputi pendapatan perkapita wilayah, sumberdaya alam, tenaga kerja dan faktor lain yang merupakan indikator dalam sektor ekonomi. (Yu, 2014: 1) pengukuran tingkat perkembangan wilayah dapat dilakukan dengan pengukuran analisis spasial dengan menganalisis pembangunan regional yang diidentifikasi pada faktor kelembagaan serta globalisasi, pengukuran dapat dilakukan dengan perhitungan indikator pendidikan, kesehatan, ekonomi dan pemenuhan infrastruktur. Sudarya, Sitorus, & Firdaus (2013:5) hasil analisis perkembangan wilayah dilihat dari ketersediaan jumlah dan jenis sarana pelayanan di wilayah tersebut, semakin banyak jumlah sarana suatu pada wilayah menunjukkan bahwa wilayah tersebut semakin berkembang.

Sitorus *et al* (2012 :1) menyatakan bahwa kemajuan pembangunan di suatu wilayah sejalan dengan peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk yang diiringi meningkatnya standar kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup. Dampak dari peningkatan kebutuhan ketersediaan fasilitas, untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas. Terkonsentrasinya fasilitas-fasilitas pelayanan pada suatu wilayah, laju pertumbuhan penduduk, kesenjangan antar wilayah serta kesejahteraan, menuntut perhatian terhadap masalah yang berkaitan dengan pelayanan sosial ekonomi untuk menghindari semakin bertambahnya arus penduduk ke wilayah pusat pelayanan karena pada gilirannya daerah pusat akan makin dipadati oleh penduduk yang menuntut lebih banyaknya fasilitas pelayanan sehingga kesenjangan antar wilayah semakin tinggi (Hardjasaputra, 2003: 05).

Fenomena kesenjangan tingkat perkembangan antar wilayah terjadi di Kabupaten Lamongan, pusat pengembangan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lamongan yaitu pada Kecamatan Lamongan, Paciran dan Babat. Kecamatan tersebut juga belum banyak berperan sebagai pusat pengembangan bagi wilayah di sekitar. Lemahnya peran pusat pengembangan tersebut dipertegas dengan fakta masih banyaknya wilayah yang terisolasi oleh jangkauan fasilitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan ekonomi sehingga akan berdampak pada semakin padatnya arus penduduk ke pusat pelayanan. Kajian mengenai perkembangan wilayah penting karena perlunya investasi pengembangan pelayanan terutama dalam menjamin ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas sosial dan ekonomi sehingga perlu diketahui daerah yang perlu menjadi prioritas intervensi dan investasi pengembangan dalam sebuah daerah agar daerah tersebut semakin

berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan wilayah dengan menganalisis tingkat perkembangan wilayah, menganalisis pusat pertumbuhan wilayah serta melihat tipologi wilayah untuk menentukan wilayah perkotaan. Uraian latar belakang diatas menjelaskan terkonsentrasinya wilayah yang menjadi pusat pemenuhan fasilitas bagi masyarakat, sehingga peneliti berupaya melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Spasial Tingkat Perkembangan Wilayah Perkotaan di Kabupaten Lamongan Provinsi Jawa Timur**”.

#### **B. Identifikas Masalah**

Uraian permasalahan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di Kabupaten Lamongan, yaitu:

1. Ketidak merataan tingkat perkembangan wilayah bagi masyarakat
2. Ketidak merataan kesejahteraan bagi masyarakat
3. Ketidak merataan laju pertumbuhan penduduk
4. Ketidak merataan fasilitas pendidikan bagi masyarakat
5. Ketidak merataan pemenuhan fasilitas sosial ekonomi bagi masyarakat
6. Adanya kesenjangan antar wilayah

#### **C. Pembatasan Masalah**

Sehubungan dengan banyaknya masalah yang teridentifikasi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah yang terkait dengan:

1. Melihat tingkat perkembangan wilayah antar kecamatan di Kabupaten Lamongan

2. Melihat jumlah fasilitas sosial dan ekonomi dengan tujuan menentukan hirarki dan pusat pelayanan
3. Pengelompokan wilayah yang dikategorikan sebagai wilayah perkotaan dengan menggunakan indikator tingkat perkembangan wilayah dan hirarki pusat pelayanan

Berdasarkan masalah tersebut yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah analisis tingkat perkembangan wilayah, analisis hirarki pusat pelayanan dan analisis tipologi untuk menentukan wilayah perkotaan di Kabupaten Lamongan.

#### **D. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana hirarki wilayah dan pusat pelayanan di Kabupaten Lamongan?
3. Bagaimanan tipologi wilayah di Kabupaten Lamongan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran analisis wilayah perkotaan pada wilayah penelitian. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Lamongan
2. Mengetahui hirarki wilayah dan pusat pelayanan di Kabupaten Lamongan
3. Mengetahui tipologi untuk menentukan wilayah perkotaan di Kabupaten Lamongan

## **F. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis dan manfaat teoritis:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan penelitian selanjutnya atau penelitian sejenisnya khususnya yang berkaitan dengan pengembangan wilayah.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan pembangunan wilayah berdasarkan potensi dan karakteristik yang ditentukan, serta sebagai bahan pertimbangan dalam kebijakan pembangunan wilayah di Kabupaten Lamongan.

#### **b. Bagi Pendidikan**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber inspirasi untuk pembelajaran Geografi di SMA kelas XII IPS Semester 1 pada Kompetensi Dasar 3.3 yaitu “ Menganalisis pola persebaran dan interaksi spasial antara desa dan kota untuk pengembangan ekonomi daerah”.